

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan dijelaskan tinjauan kepustakaan dalam penelitian mengenai *psychological well-being* pada wanita dewasa muda yang menjadi istri kedua. Tinjauan kepustakaan tersebut mencakup teori mengenai *psychological well-being*, dewasa muda, pernikahan, dan poligami.

2.1. *Psychological Well-Being*

2.1.1. Perkembangan Pemikiran *Psychological Well-Being*

Peningkatan minat dalam penelitian-penelitian mengenai *psychological well-being* didasari oleh kesadaran bahwa ilmu psikologi, sejak awal pembentukannya, lebih menaruh perhatian dan pemikiran pada rasa ketidakbahagiaan dan gangguan-gangguan psikis yang dialami manusia daripada menaruh perhatian pada faktor-faktor yang dapat mendukung dan mendorong timbulnya *positive functioning* pada diri manusia (Diener, 1984; Jahoda, 1958, dalam Ryff, 1989).

Pada awalnya, mental yang sehat di definisikan sebagai berikut:

Mental health as the opposite of mental disease is perhaps the most widespread and apparently simplest attempt at definition (Jahoda, 1958, hal. 10).

Namun dalam perkembangannya, jajak pendapat secara informal yang dilakukan *Joint Commission on Mental Illness and Health* terhadap para ahli mengenai kualitas dan makna yang terkait dengan *mental health*, sebagian besar mengungkapkan kebahagiaan (*happiness*), kesejahteraan (*well-being*), dan kepuasan (*contentment*) sebagai hal yang terkait dengan *mental health*.

Konsepsi *well-being* sendiri mengacu pada pengalaman dan fungsi psikologis yang optimal (Ryan & Deci, 2001). Hingga saat ini, terdapat dua paradigma dan perspektif besar mengenai *well-being* yang diturunkan dari dua pandangan filsafat yang berbeda.

Pandangan yang pertama, yang disebut *hedonic*, memandang bahwa tujuan hidup yang utama adalah mendapatkan kenikmatan secara optimal, atau dengan kata lain, mencapai kebahagiaan. Pandangan yang dominan diantara ahli psikologi yang berpandangan hedonik adalah *well-being* tersusun atas kebahagiaan subjektif

dan berfokus pada pengalaman yang mendatangkan kenikmatan. Diener dan Lucas (dalam Ryan & Deci, 2001) mengembangkan model pengukuran untuk mengevaluasi *pleasure/pain continuum* dalam pengalaman manusia. Model pengukuran ini disebut *subjective well-being*, yang terdiri dari tiga komponen, yaitu kepuasan hidup, adanya afek positif, dan tidak adanya afek negatif. Ketiga komponen ini seringkali dirangkum dalam konsep 'kebahagiaan' (Diener & Lucas, dalam Ryan & Deci, 2001).

Sementara pandangan *hedonic* memformulasikan *well-being* dalam konsep kepuasan hidup dan kebahagiaan, pandangan yang kedua, *eudaimonic*, memformulasikan *well-being* dalam konsep aktualisasi potensi manusia dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan (Keyes, Shmotkin, & Ryff, 2002)

Waterman (1993) mengemukakan bahwa konsepsi *well-being* dalam pandangan *eudaimonic* menekankan pada bagaimana cara manusia untuk hidup dalam *daimon*-nya, atau dirinya yang sejati (*true self*). Diri yang sejati ini terjadi ketika manusia melakukan aktivitas yang paling kongruen atau sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dan dilakukan secara menyeluruh serta benar-benar terlibat didalamnya (*fully engaged*) (Ryan & Deci, 2001). *Daimon* juga mengacu pada potensi yang dimiliki tiap-tiap individu, yakni realisasi yang merepresentasikan pemenuhan hidup yang niscaya setiap individu mampu melakukannya (Waterman, dalam Strümpfer, 2002). Oleh karena itu, pendekatan *eudaimonic* berfokus pada realisasi diri, ekspresi pribadi, dan sejauh mana seorang individu mampu untuk mengaktualisasikan potensi dirinya (Waterman, dalam Ryan & Deci, 2001).

Aktivitas-aktivitas *hedonic* yang dilakukan dengan mengejar kenikmatan dan menghindari rasa sakit akan menimbulkan *well-being* yang bersifat sementara dan berkembang menjadi sebuah kebiasaan sehingga lama-kelamaan kehilangan esensi sebagai suatu hal yang bermakna. Sedangkan aktivitas-aktivitas *eudaimonic* ternyata lebih dapat mempertahankan kondisi *well-being* dalam waktu yang relatif lama dan konsisten (Steger, Kashdan, & Oishi, 2007). Aktivitas-aktivitas *eudaimonic* yang dimaksud terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Baumeister dan Leary (1995); Myers (2000); Lucas, Diener dan Suh (1996); serta Ryff dan Singer (1998) bahwa kebahagiaan dan kepuasan hidup dirasakan lebih besar ketika individu mengalami pengalaman membina hubungan dengan orang

lain dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu (*relatedness* dan *belongingness*), dapat menerima dirinya sendiri, dan memiliki makna dan tujuan dari hidup yang mereka jalani (Steger, Kashdan, & Oishi, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Kasser dan Ryan (1993, 1996); Oishi, Diener, Suh, dan Lucas (1999); Ryan et al. (1999); Sheldon & Kasser (1995); Sheldon, Ryan, Deci, dan Kasser (2004) menunjukkan bahwa mengejar dan mencapai sebuah tujuan yang paling kongruen dengan nilai dan keyakinan diri berkontribusi dalam meningkatkan *well-being* (Steger, Kashdan, & Oishi, 2007). Selain itu, Sheldon dan Elliot (1999) menemukan bahwa mengejar dan mencapai tujuan yang dapat memunculkan rasa kemandirian, kompetensi, dan menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain juga berpotensi untuk meningkatkan *well-being* (Steger, Kashdan, & Oishi, 2007).

Ryff dan Keyes (1995) memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai apa itu *psychological well-being* dalam pendapatnya yang tercantum pada kutipan berikut:

"Comprehensive accounts of psychological well-being need [to] probe people's sense of whether their lives have purpose, whether they are realizing their given potential, what is the quality of their ties to others, and if they feel in charge of their own lives"(Ryff & Keyes, 1995, hal. 725).

Berdasarkan kutipan diatas, dapat disimpulkan bahwa Ryff dan Keyes (1995) memandang *psychological well-being* berdasarkan sejauh mana seorang individu memiliki tujuan dalam hidupnya, apakah mereka menyadari potensi-potensi yang dimiliki, kualitas hubungannya dengan orang lain, dan sejauh mana mereka merasa bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri.

2.1.2. Definisi *Psychological Well-Being*

Ryff (1989) merumuskan konsepsi *psychological well-being* yang merupakan integrasi dari teori-teori perkembangan manusia, teori psikologi klinis, dan konsepsi mengenai kesehatan mental (Ryff, 1989).

Berdasarkan teori-teori tersebut, Ryff (1989) mendefinisikan *psychological well-being* sebagai sebuah kondisi dimana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat menciptakan dan mengatur

lingkungan yang kompatibel dengan kebutuhannya, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya.

2.2.3. Dimensi-Dimensi *Psychological Well-Being*

Enam dimensi *psychological well-being* yang merupakan intisari dari teori-teori *positive functioning psychology* yang dirumuskan oleh Ryff (dalam Ryff, 1989; Ryff dan Keyes, 1995), yaitu:

1. Dimensi penerimaan diri (*self-acceptance*)

Dalam teori perkembangan manusia, *self-acceptance* berkaitan dengan penerimaan diri individu pada masa kini dan masa lalunya. Selain itu dalam literatur *positive psychological functioning*, *self-acceptance* juga berkaitan dengan sikap positif terhadap diri sendiri (Ryff, 1989).

Seorang individu dikatakan memiliki nilai yang tinggi dalam dimensi penerimaan diri apabila ia memiliki sikap yang positif terhadap dirinya sendiri, menghargai dan menerima berbagai aspek yang ada pada dirinya, baik kualitas diri yang baik maupun yang buruk. Selain itu, orang yang memiliki nilai penerimaan diri yang tinggi juga dapat merasakan hal yang positif dari kehidupannya dimasa lalu (Ryff, 1995).

Sebaliknya, seseorang dikatakan memiliki nilai yang rendah dalam dimensi penerimaan diri apabila ia merasa kurang puas terhadap dirinya sendiri, merasa kecewa dengan apa yang telah terjadi pada kehidupannya dimasa lalu, memiliki masalah dengan kualitas tertentu dari dirinya, dan berharap untuk menjadi orang yang berbeda dari dirinya sendiri (Ryff, 1995).

2. Dimensi hubungan positif dengan orang lain (*positive relations with others*)

Kemampuan untuk mencintai dipandang sebagai komponen utama dari kondisi mental yang sehat. Selain itu, teori *self-actualization* mengemukakan konsepsi hubungan positif dengan orang lain sebagai perasaan empati dan afeksi kepada orang lain serta kemampuan untuk membina hubungan yang mendalam dan identifikasi dengan orang lain.

Membina hubungan yang hangat dengan orang lain merupakan salah satu dari *criterion of maturity* yang dikemukakan oleh Allport (dalam Ryff, 1989). Teori perkembangan manusia juga menekankan *intimacy* dan *generativity* sebagai tugas utama yang harus dicapai manusia dalam tahap perkembangan tertentu.

Seseorang yang memiliki hubungan positif dengan orang lain mampu membina hubungan yang hangat dan penuh kepercayaan dengan orang lain. Selain itu, individu tersebut memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain, dapat menunjukkan empati, afeksi, dan intimitas, serta memahami prinsip memberi dan menerima dalam hubungan antar pribadi (Ryff, 1995).

Sebaliknya, Ryff (1995) mengemukakan bahwa seseorang yang kurang baik dalam dimensi hubungan positif dengan orang lain ditandai dengan tingkah laku yang tertutup dalam berhubungan dengan orang lain, sulit untuk bersikap hangat, peduli, dan terbuka dengan orang lain, terisolasi dan merasa frustrasi dalam membina hubungan interpersonal, tidak berkeinginan untuk berkompromi dalam mempertahankan hubungan dengan orang lain.

3. Dimensi otonomi (*autonomy*)

Teori *self-actualization* mengemukakan otonomi dan resistensi terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungannya. Roger (1961) mengemukakan bahwa seseorang dengan *fully functioning* digambarkan sebagai seorang individu yang memiliki *internal locus of evaluation*, dimana orang tersebut tidak selalu membutuhkan pendapat dan persetujuan dari orang lain, namun mengevaluasi dirinya sendiri dengan standar personal (Ryff, 1989). Teori perkembangan memandang otonomi sebagai rasa kebebasan yang dimiliki seseorang untuk terlepas dari norma-norma yang mengatur kehidupan sehari-hari.

Ciri utama dari seorang individu yang memiliki otonomi yang baik antara lain dapat menentukan segala sesuatu seorang diri (*self-determining*) dan mandiri. Ia mampu untuk mengambil keputusan tanpa tekanan dan campur tangan orang lain. Selain itu, orang tersebut memiliki

ketahanan dalam menghadapi tekanan sosial, dapat mengatur tingkah laku dari dalam diri, serta dapat mengevaluasi diri dengan standar personal (Ryff, 1995).

Sebaliknya, seseorang yang kurang memiliki otonomi akan sangat memperhatikan dan mempertimbangkan harapan dan evaluasi dari orang lain, berpegangan pada penilaian orang lain untuk membuat keputusan penting, serta bersikap konformis terhadap tekanan sosial (Ryff, 1995).

4. Dimensi penguasaan lingkungan (*environmental mastery*)

Salah satu karakteristik dari kondisi kesehatan mental adalah kemampuan individu untuk memilih dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kondisi psikisnya. Allport (1961) menyebutkan bahwa individu yang matang akan mampu berpartisipasi dalam aktivitas di luar dirinya (Ryff, 1989). Dalam teori perkembangan juga disebutkan bahwa manusia dewasa yang sukses adalah seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan perbaikan pada lingkungan dan melakukan perubahan-perubahan yang dinilai perlu melalui aktivitas fisik dan mental serta mengambil manfaat dari lingkungan tersebut.

Seseorang yang baik dalam dimensi penguasaan lingkungan memiliki keyakinan dan kompetensi dalam mengatur lingkungan. Ia dapat mengendalikan berbagai aktivitas eksternal yang berada di lingkungannya termasuk mengatur dan mengendalikan situasi kehidupan sehari-hari, memanfaatkan kesempatan yang ada di lingkungannya, serta mampu memilih dan menciptakan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai pribadi.

Sebaliknya, seseorang yang memiliki penguasaan lingkungan yang kurang baik akan mengalami kesulitan dalam mengatur situasi sehari-hari, merasa tidak mampu untuk mengubah atau meningkatkan kualitas lingkungan sekitarnya, kurang peka terhadap kesempatan yang ada di lingkungannya, dan kurang memiliki kontrol terhadap lingkungan (Ryff, 1995).

5. Dimensi tujuan hidup (*purpose in life*)

Kondisi mental yang sehat memungkinkan individu untuk menyadari bahwa ia memiliki tujuan tertentu dalam hidup yang ia jalani serta mampu memberikan makna pada hidup yang ia jalani. Allport (1961) menjelaskan bahwa salah satu ciri kematangan individu adalah memiliki tujuan hidup, yakni memiliki rasa keterarahan (*sense of directedness*) dan rasa bertujuan (*intentionality*) (Ryff, 1989). Teori perkembangan juga menekankan pada berbagai perubahan tujuan hidup sesuai dengan tugas perkembangan dalam tahap perkembangan tertentu. Selain itu, (Rogers, 1961) mengemukakan bahwa *fully functioning person* memiliki tujuan dan cita-cita serta rasa keterarahan yang membuat dirinya merasa bahwa hidup ini bermakna (Ryff, 1989).

Seseorang yang memiliki nilai tinggi dalam dimensi tujuan hidup memiliki rasa keterarahan (*directedness*) dalam hidup, mampu merasakan arti dari masa lalu dan masa kini, memiliki keyakinan yang memberikan tujuan hidup, serta memiliki tujuan dan target yang ingin dicapai dalam hidup (Ryff, 1995).

Sebaliknya, seseorang yang kurang memiliki tujuan hidup akan kehilangan makna hidup, memiliki sedikit tujuan hidup, kehilangan rasa keterarahan dalam hidup, kehilangan keyakinan yang memberikan tujuan hidup, serta tidak melihat makna yang terkandung untuk hidupnya dari kejadian di masa lalu (Ryff, 1995).

6. Dimensi pertumbuhan pribadi (*personal growth*)

Optimal psychological functioning tidak hanya bermakna pada pencapaian terhadap karakteristik-karakteristik tertentu, namun pada sejauh mana seseorang terus-menerus mengembangkan potensi dirinya, bertumbuh, dan meningkatkan kualitas positif pada dirinya (Ryff, 1989). Kebutuhan akan aktualisasi diri dan menyadari potensi diri merupakan perspektif utama dari dimensi pertumbuhan diri. Keterbukaan akan pengalaman baru merupakan salah satu karakteristik dari *fully functioning person* (Ryff, 1989). Teori perkembangan juga menekankan pada pentingnya manusia untuk bertumbuh dan menghadapi tantangan baru dalam setiap periode pada tahap perkembangannya.

Seseorang yang memiliki pertumbuhan pribadi yang baik ditandai dengan adanya perasaan mengenai pertumbuhan yang berkesinambungan dalam dirinya, memandang diri sendiri sebagai individu yang selalu tumbuh dan berkembang, terbuka terhadap pengalaman-pengalaman baru, memiliki kemampuan dalam menyadari potensi diri yang dimiliki, dapat merasakan peningkatan yang terjadi pada diri dan tingkah lakunya setiap waktu, serta dapat berubah menjadi pribadi yang lebih efektif dan memiliki pengetahuan yang bertambah (Ryff, 1995).

Sebaliknya, seseorang yang memiliki pertumbuhan pribadi yang kurang baik akan merasa dirinya mengalami stagnasi, tidak melihat peningkatan dan pengembangan diri, merasa bosan dan kehilangan minat terhadap kehidupannya, serta merasa tidak mampu dalam mengembangkan sikap dan tingkah laku yang lebih baik (Ryff, 1995).

2.1.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Psychological Well-Being*

Faktor-faktor yang mempengaruhi *psychological well-being* seseorang antara lain (Ryff, 1989; Ryff & Keyes, 1995; Ryff, 1994; Ryff & Essex, 1992; Sarafino, 1990):

A. Faktor Demografis

Beberapa faktor demografis yang mempengaruhi *psychological well-being* antara lain adalah sebagai berikut:

1. Usia

Ryff dan Keyes (1995) mengemukakan bahwa perbedaan usia mempengaruhi perbedaan dalam dimensi-dimensi *psychological well-being*. Dalam penelitiannya, Ryff dan Keyes (1995) menemukan bahwa dimensi penguasaan lingkungan dan dimensi otonomi mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia, terutama dari dewasa muda hingga dewasa madya. Dimensi hubungan positif dengan orang lain juga mengalami peningkatan seiring bertambahnya usia.

Sebaliknya, dimensi tujuan hidup dan pertumbuhan pribadi memperlihatkan penurunan seiring bertambahnya usia, penurunan ini terutama terjadi pada dewasa madya hingga dewasa akhir. Dari penelitian

tersebut menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan dalam dimensi penerimaan diri selama usia dewasa muda hingga dewasa akhir.

2. Jenis Kelamin

Penelitian Ryff (dalam Ryff & Keyes, 1995) menemukan bahwa dibandingkan pria, wanita memiliki skor yang lebih tinggi pada dimensi hubungan yang positif dengan orang lain dan dimensi pertumbuhan pribadi.

3. Status Sosial Ekonomi

Perbedaan kelas sosial juga mempengaruhi kondisi *psychological well-being* seorang individu. Data yang diperoleh dari Wisconsin Longitudinal Study memperlihatkan gradasi sosial dalam kondisi *well-being* pada dewasa madya. Data tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan tinggi dan status pekerjaan meningkatkan *psychological well-being*, terutama pada dimensi penerimaan diri dan dimensi tujuan hidup (Ryff, 1994). Mereka yang menempati kelas sosial yang tinggi memiliki perasaan yang lebih positif terhadap diri sendiri dan masa lalu mereka, serta lebih memiliki rasa keterarahan dalam hidup dibandingkan dengan mereka yang berada di kelas sosial yang lebih rendah.

4. Budaya

Penelitian mengenai *psychological well-being* yang dilakukan di Amerika dan Korea Selatan menunjukkan bahwa responden di Korea Selatan memiliki skor yang lebih tinggi pada dimensi hubungan positif dengan orang lain dan skor yang rendah pada dimensi penerimaan diri. Hal ini dapat disebabkan oleh orientasi budaya yang lebih bersifat kolektif dan saling ketergantungan. Sebaliknya, responden Amerika memiliki skor yang tinggi dalam dimensi pertumbuhan pribadi (untuk responden wanita) dan dimensi tujuan hidup (untuk responden pria), serta memiliki skor yang rendah dalam dimensi otonomi, baik pria maupun wanita (Ryff, 1994).

B. Dukungan Sosial

Menurut Davis (dalam Pratiwi, 2000), individu-individu yang mendapatkan dukungan sosial memiliki tingkat *psychological well-being* yang lebih tinggi. Dukungan sosial sendiri diartikan sebagai rasa nyaman,

perhatian, penghargaan, atau pertolongan yang dipersepsikan oleh seorang individu yang didapat dari orang lain atau kelompok (Cobb, 1976; Gentry & Kobasa, 1984; Wallston, Alagna, DeVellis, & DeVellis, 1983; Wills, 1974, dalam Sarafino, 1990). Dukungan ini dapat berasal dari berbagai sumber, diantaranya pasangan, keluarga, teman, rekan kerja, dokter, maupun organisasi sosial.

Dari penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Cobb (1976), Cohen & McKay (1984), House (1984), Schaefer, Coyne, & Lazarus (1981), dan Wills (1984), ada empat jenis dukungan sosial (dalam Sarafino, 1990), yaitu:

1. Dukungan Emosional (*emotional support*)

Dukungan emosional melibatkan empati, kepedulian, dan perhatian terhadap seseorang. Dukungan ini memberikan rasa nyaman, aman, dimiliki, dan dicintai pada individu penerima, terutama pada saat-saat stress.

2. Dukungan Penghargaan (*esteem support*)

Dukungan penghargaan muncul melalui pengungkapan penghargaan yang positif, dorongan atau persetujuan terhadap pemikiran atau perasaan, dan juga perbandingan yang positif antara individu dengan orang lain. Dukungan ini membangun harga diri, kompetensi, dan perasaan dihargai.

3. Dukungan Instrumental (*tangible or instrumental support*)

Dukungan instrumental melibatkan tindakan konkrit atau memberikan pertolongan secara langsung.

4. Dukungan Informasional (*informational support*)

Dukungan informasional meliputi pemberian nasehat, petunjuk, saran, atau umpan balik terhadap tingkah laku seseorang.

C. Evaluasi terhadap Pengalaman Hidup

Ryff (1989) mengemukakan bahwa pengalaman hidup tertentu dapat mempengaruhi kondisi *psychological well-being* seorang individu. Pengalaman-pengalaman tersebut mencakup berbagai bidang kehidupan dalam berbagai periode kehidupan.

Evaluasi individu terhadap pengalaman hidupnya memiliki pengaruh yang penting terhadap *psychological well-being* (Ryff, 1995). Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ryff dan Essex (1992) mengenai pengaruh interpretasi dan evaluasi individu pada pengalaman hidupnya terhadap kesehatan mental. Interpretasi dan evaluasi pengalaman hidup diukur dengan mekanisme evaluasi diri oleh Rosenberg (dalam Ryff & Essex, 1992) dan dimensi-dimensi *psychological well-being* digunakan sebagai indikator kesehatan mental individu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi diri ini berpengaruh pada *psychological well-being* individu, terutama dalam dimensi penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan hubungan yang positif dengan orang lain.

Mekanisme evaluasi diri yang dikemukakan oleh Rosenberg (dalam Ryff & Essex, 1992) adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Perbandingan Sosial (*Social Comparison*)

Dalam mekanisme perbandingan sosial, individu mempelajari dan mengevaluasi dirinya dengan cara membandingkan dirinya dengan orang lain. Perbandingan ini dapat mengarah pada evaluasi diri positif, negatif, atau netral, bergantung pada standar yang digunakan untuk perbandingan, yang dalam hal ini biasanya adalah orang atau kelompok referensi.

2. Mekanisme Perwujudan Penghargaan (*Reflected Appraisal*)

Mekanisme ini mengikuti premis simbolik interaksionis yang mengemukakan bahwa individu dipengaruhi oleh sikap yang ditunjukkan orang lain terhadap dirinya, sehingga lama-kelamaan individu akan memandang diri mereka sendiri sesuai dengan pandangan orang lain terhadap diri mereka. Dengan kata lain, umpan balik yang dipersepsikan individu dari *significant others* selama mereka mengalami suatu pengalaman hidup tertentu merupakan suatu mekanisme evaluasi diri.

3. Mekanisme Persepsi Diri terhadap Tingkah Laku (*Behavioral Self-Perceptions*)

Menurut Bern (dalam Ryff & Essex, 1992), individu menyimpulkan mengenai kecenderungan, kemampuan dan kompetensi mereka dengan

cara mengobservasi tingkah laku mereka sendiri. Observasi diri ini merupakan bagian dari proses dimana individu memberikan makna terhadap pengalaman hidup mereka. Mereka yang mempersepsikan perubahan positif dalam diri diharapkan dapat memandang pengalaman secara lebih positif sehingga dapat menunjukkan penyesuaian diri yang baik.

4. Mekanisme pemusatan psikologis (*Psychological Centrality*)

Dalam mekanisme ini, dikemukakan bahwa konsep diri tersusun dari beberapa komponen yang tersusun secara hirarki dan sifatnya memusat pada diri. Dengan kata lain, ada komponen yang lebih terpusat dari komponen lain, dimana semakin terpusat suatu komponen, maka pengaruhnya semakin besar terhadap konsep diri. Oleh karena itu, untuk memahami dampak dari pengalaman hidup terhadap kondisi *psychological well-being*, maka harus dipahami pula sejauh mana peristiwa dan dampaknya mempengaruhi komponen utama atau komponen perifer dari konsep diri seseorang. Jika pengalaman tersebut hanya mempengaruhi komponen yang bersifat perifer, maka mekanisme perbandingan sosial, perwujudan penghargaan, dan persepsi diri terhadap tingkah laku kurang berpengaruh terhadap *psychological well-being*, namun jika suatu pengalaman hidup mempengaruhi komponen inti konsep diri, maka mekanisme perbandingan sosial, perwujudan penghargaan, dan persepsi diri terhadap tingkah laku akan sangat berpengaruh terhadap *psychological well-being*.

Untuk mendapatkan informasi mengenai inti dari identitas seorang individu, maka dapat ditanyakan seberapa penting komponen-komponen hidup yang berbeda, seperti kesehatan, keluarga, teman, dll, bagi mereka. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti dapat menanyakan seberapa penting arti sebuah pernikahan dan keluarga bagi diri individu.

D. Locus of Control (LOC)

Locus of control didefinisikan sebagai suatu ukuran harapan umum seseorang mengenai pengendalian (kontrol) terhadap penguatan (*reinforcement*) yang mengikuti perilaku tertentu (Rotter, dalam Anastasi,

1997). Beberapa penelitian (Phares, dalam Suherni, 2002) mencoba mengklasifikasikan ciri-ciri orang yang memiliki *locus of control* internal dan eksternal sebagai berikut:

1. Seseorang dengan LOC internal akan mencari informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan orang yang memiliki LOC eksternal. Seseorang dengan LOC internal lebih banyak menggunakan data dan informasi yang akan menolong mereka dalam mengambil keputusan. Ia meyakini bahwa apa yang terjadi pada mereka ditentukan oleh diri mereka sendiri. Berbeda dengan LOC eksternal yang menganggap kejadian yang menimpa diri mereka disebabkan oleh faktor eksternal, seperti takdir dan kendali orang lain.
2. Seseorang dengan LOC internal akan lebih aktif dan konstruktif dalam situasi yang frustrasi. Mereka akan mengambil tindakan dalam menghadapi rintangan.
3. Seseorang yang mempunyai LOC internal akan lebih memberikan perhatian pada umpan balik atas tindakan mereka. Tingkah laku mereka secara penuh dipengaruhi oleh kesuksesan dan kegagalan masa lalu. Kalau mereka gagal, mereka akan mencari alternatif jalan keluar. Sedangkan seseorang dengan LOC eksternal akan menaruh perhatian yang sedikit pada umpan balik, lebih kaku, dan kurang adaptif.
4. Seseorang yang mempunyai LOC internal akan bertahan dalam tekanan sosial dan pengaruh masyarakat dibandingkan orang yang memiliki LOC eksternal dan sikap mereka relatif stabil. Sedangkan seseorang dengan LOC eksternal akan bersikap lebih konformis.

Robinson et.al (dalam Pratiwi, 2000) mengemukakan bahwa *locus of control* dapat memberikan peramalan terhadap *well-being* seseorang. Individu dengan *locus of control internal* pada umumnya memiliki tingkat *psychological well-being* yang lebih tinggi dibanding individu dengan *locus of control eksternal*.

E. Faktor Religiusitas

Penelitian-penelitian mengenai psikologi dan religiusitas yang dilakukan antara lain oleh Ellison dan Levin (1998), Ellison et.al (2001), Koenig

(2004), Krause dan Ellison (2003) menemukan hubungan positif antara religiusitas dan *psychological well-being* (Flannelly, Koenig, Ellison, Galek, & Krause, 2006). Kemudian, Chatter dan Ellison (dalam Levin, 1994) juga menemukan adanya kaitan antara keterlibatan religius (*religious involvement*) dengan *well-being*.

Dalam penelitian yang berjudul *Religious Involvement Among Older African Americans* yang ditulis oleh Levin (dalam Chatters & Taylor, 1994) ditemukan beberapa hal yang menunjukkan fungsi psikososial dari agama yang antara lain: 1). Doa dapat berperan penting sebagai *coping* dalam menghadapi masalah pribadi, 2). Partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan dapat berdampak pada persepsi rasa penguasaan lingkungan dan meningkatkan *self-esteem*, 3). Keterlibatan religius merupakan prediktor evaluasi kepuasan hidup.

2.2. Dewasa Muda

2.2.1. Perkembangan Psikososial Dewasa Muda

Dewasa muda adalah periode penyesuaian terhadap pola-pola hidup yang baru. Penyesuaian-penyesuaian ini merupakan salah satu faktor pembeda antara dewasa muda dengan tahapan lain dalam rentang hidup manusia, sekaligus merupakan hal yang dapat menjadi sumber masalah. Penyesuaian-penyesuaian ini antara lain penyesuaian dalam pernikahan dan rumah tangga, menjadi orang tua, dan penyesuaian dalam dunia pekerjaan (Hurlock, 1980).

Levinson (dalam Dacey & Travers, 2002; Turner & Helms, 1995) mengemukakan bahwa periode dewasa muda pada umumnya melewati empat tahap yang terbagi menjadi *early adult transition* (17-22 tahun), *entry life structure for early adulthood* (22-28 tahun), *age 30 transition* (28-33 tahun), dan *culminating life structure for early adulthood* (30-40 tahun). Tahapan *early adult transition*, *entry life structure for early adulthood*, dan *age 30 transition* disebut juga *novice phase* (Dacey & Travers, 2002), yang ditandai dengan empat hal utama yang harus dicapai oleh individu dewasa muda. Empat hal tersebut antara lain: 1). *the dream*, yaitu individu dewasa muda mulai menentukan visi sendiri, yang terlepas dari harapan orang lain dan pengaruh keluarga, 2) *mentor*

relationship, dimana seorang dewasa muda laki-laki menemukan seseorang yang lebih tua dan lebih berpengalaman untuk memberikan saran yang berkaitan dengan pilihan-pilihan dalam hidupnya, 3). *an occupational decision*, atau pemilihan karir yang sesuai dengan potensi diri, serta 4). *love relationship*, yakni individu dewasa muda mulai mengambil keputusan mengenai pasangan hidup, keluarga, dan bentuk hubungan yang diinginkan dengan pasangan. *Culminating life structure for early adulthood* ditandai dengan dua hal utama yang harus dicapai, yakni pengukuhan diri dalam masyarakat dan mencapai peningkatan serta keberhasilan diri dalam masyarakat.

Keinginan untuk menikah, memiliki pasangan hidup, dan membina keluarga juga berkaitan dengan apa yang dinyatakan Erikson sebagai tahap perkembangan psikososial *intimacy vs isolation* (Turner & Helms, 1995; Papalia, Olds, & Feldman, 2004; Dacey & Travers, 2002). Dalam tahap perkembangan psikososial ini, individu dewasa muda terdorong untuk menggabungkan jati dirinya dengan jati diri orang lain dalam suatu hubungan. *Intimacy*, menurut Erikson (dalam Dacey & Travers, 2002) merupakan kemampuan untuk menghubungkan secara mendalam harapan-harapan dan ketakutan diri kepada orang lain sekaligus menerima kebutuhan *intimacy* orang lain.

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa *intimacy* dapat dicapai apabila seseorang memahami jati dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan kepada orang lain untuk berbagi. Hubungan yang *intimate* juga dapat dicapai apabila seorang individu memiliki kematangan dalam berkomunikasi dengan orang lain, sensitif terhadap kebutuhan orang lain, dan dapat bertoleransi kepada orang lain (Turner & Helms, 1995). Sebaliknya, individu yang tidak dapat mengembangkan *intimacy* kepada orang lain akan mengalami *isolation*, yaitu keadaan individu yang menarik diri karena merasa terancam oleh perilaku orang lain.

2.3. Pernikahan

2.3.1. Definisi Pernikahan

Duvall dan Miller (1985) mendefinisikan pernikahan sebagai berikut:

“Marriage can be most accurately defined as the socially recognized relationship between a man and woman that provides for sexual relations, legitimizes child-bearing, and establishes a division of labor between spouses.”

Sedangkan Regan (2003) memberikan definisi mengenai pernikahan sebagai berikut:

“Marriage is a long-term mating arrangement that is socially sanctioned and that typically involves economic, social, and reproductive cooperation between the partners (p. 181).”

Dari definisi-definisi diatas, dapat dilihat bahwa ada beberapa hal yang terkandung dalam pernikahan, yakni:

1. Pernikahan bersifat sosial yang berarti diketahui secara publik (*publicly recognized*) dan diatur oleh hukum pemerintah atau agama.
2. Pernikahan bersifat heteroseksual, yang berarti dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan.
3. Pernikahan melegitimasi pengasuhan anak, yakni masyarakat dapat mengidentifikasi orang tua dari seorang anak dan meminta pertanggungjawaban terhadap kesejahteraan sang anak.
4. Pernikahan memungkinkan terjadinya adanya pembagian dan kerjasama suami dan istri dalam hal-hal yang menyangkut ekonomi, sosial, dan reproduksi.

2.3.2. Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya Pernikahan

Ada berbagai faktor dan alasan yang mendorong seseorang untuk menikah (Williams, Sawyer & Wahlstrom, 2006; Turner & Helms, 1995; dan Smolak, 1993). Olson dan DeFrain (2006) membagi alasan seseorang untuk menikah menjadi alasan positif dan alasan dan negatif yang keduanya akan diuraikan sebagai berikut:

1. Alasan Positif
 - a. Mencari teman hidup (*Companionship*)

Kesempatan untuk dapat bersama dan berbagi dengan orang lain merupakan salah satu motif yang penting dalam pernikahan. Kebersamaan dengan seseorang juga cenderung memberikan pengaruh positif terhadap *psychological well-being* (Turner & Helms, 1995).
 - b. Cinta dan intimasi

Cinta merupakan alasan utama terjadinya pernikahan (Turner & Helms, 1995). Dalam penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat, responden menyatakan bahwa mereka menikah karena cinta, hanya 4% dari responden yang menyatakan bahwa mereka bersedia menikah tidak karena cinta (Levine, dalam Williams dkk, 2006). Dengan menikah, seseorang berharap dapat menciptakan *emotional security*, yakni hubungan emosional yang dekat dan berlangsung selamanya.

c. *Supportive partnership*

Pernikahan memberikan kesempatan adanya pertumbuhan pribadi karena masing-masing individu dapat memberikan dukungan demi kesuksesan pasangannya.

d. *Sexual partnership*

Kepuasan dalam hubungan seksual dicapai paling tinggi dalam ikatan pernikahan daripada ikatan pacaran dan kohabitasi (Seccombe & Warner, 2004).

e. *Sharing parenthood*

Seorang individu dewasa muda yang menikah salah satunya juga didorong oleh keinginan untuk memiliki anak. Keinginan untuk memiliki anak ini dapat direalisasikan dalam pernikahan, karena pernikahan merupakan satu-satunya institusi yang dapat memberikan legitimasi identitas kepada anak yang dilahirkan.

2. Alasan Negatif

a. Kehamilan di luar pernikahan

Pasangan yang menikah karena kehamilan di luar nikah sebagian besar pada akhirnya akan bercerai (Teti & Lamb dalam Williams dkk, 2006). Hal ini disebabkan bahwa pasangan telah melakukan hubungan seksual namun belum cukup mengembangkan aspek-aspek intimasi dalam hubungan mereka.

b. Sebagai sarana pelarian dan pemberontakan dari orang tua

Beberapa anak muda mungkin memandang pernikahan sebagai kesempatan untuk melarikan diri dari tindakan kekerasan yang dilakukan orang tuanya, ataupun melarikan diri dari otoritas orang tua.

c. *Rebound* dari hubungan romantis sebelumnya

Beberapa pasangan juga menikah sebagai usaha pelarian untuk menghapus kenangan buruk dari hubungan cinta sebelumnya. Hal ini dapat memberikan dampak negatif dalam pernikahan, karena individu melihat pasangannya lebih sebagai ‘terapis’ atau ‘*healer*’ daripada sebagai kekasih atau pasangan.

d. Tekanan sosial

Harapan masyarakat dan tuntutan budaya dapat membuat beberapa orang merasa tidak nyaman jika ia masih lajang (Turner & Helms, 1995). Pernikahan atas dorongan pihak lain kurang dapat memberikan hubungan yang membahagiakan bagi pasangan.

e. Jaminan ekonomi

Wanita yang menikahi laki-laki karena alasan ekonomi saja mungkin akan merasakan kedekatan emosional yang minim (Williams dkk, 2006). Selain itu, keamanan ekonomi adalah sesuatu yang harus dibangun oleh masing-masing pasangan, karena permasalahan ekonomi akan selalu ada di sepanjang usia pernikahan.

2.3.3. Masalah dalam Penyesuaian Pernikahan yang dialami Dewasa Muda

Dewasa muda adalah periode dimana individu memulai lembaran hidup baru dalam bentuk pernikahan. Peristiwa ini membawa perubahan-perubahan dan hal-hal baru dalam hidup individu dan menuntut penyesuaian diri agar individu dapat menjalaninya dengan baik.

Namun demikian, ada beberapa kondisi yang dapat mempersulit proses penyesuaian dewasa muda dalam pernikahan. Kondisi-kondisi tersebut menurut Hurlock (1980) antara lain:

a. Kurangnya kemampuan dan persiapan untuk hidup berumah tangga

Kurangnya kemampuan dan persiapan yang terbatas seperti kemampuan mengatur rumah tangga, mengurus anak, membina hubungan dengan keluarga pasangan, dan pengaturan uang dapat mempersulit individu dalam menyesuaikan diri dalam pernikahan.

b. Peran dalam rumah tangga

Perubahan-perubahan peran antara suami-istri masa kini yang berbeda dengan yang dianut oleh beberapa generasi masyarakat terdahulu. Perbedaan konsep peran suami-istri berdasarkan kelas sosial atau aturan agama tertentu juga dapat memberikan masalah bagi pasangan baru jika mereka tidak mendapat informasi yang cukup atau aturan tersebut harus dilaksanakan secara kaku.

c. Pernikahan dini

Pernikahan yang dilangsungkan sebelum individu menyelesaikan pendidikan dan belum mandiri secara ekonomi dapat membuat individu tersebut kehilangan kesempatan untuk merasakan pengalaman yang dialami oleh individu lain yang belum menikah. Kondisi ini dapat mengarah pada kecemburuan dan penyesalan sehingga dapat mempersulit proses penyesuaian individu dalam pernikahan.

d. Latar belakang sosial budaya

Pernikahan antar individu yang berbeda suku, agama, dan budaya dapat mempersulit proses penyesuaian dalam pernikahan, terutama dalam membina hubungan dengan keluarga pasangan.

e. Masa pacaran yang singkat

Masa pacaran yang singkat menyebabkan pasangan kurang mengenal satu sama lain dan menyebabkan pasangan kurang memiliki kesempatan untuk belajar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan mereka hadapi ketika mereka benar-benar menikah nanti.

f. Ide-ide romantis mengenai pernikahan

Kebanyakan dewasa muda memiliki ide-ide romantis mengenai pernikahan yang terlalu berlebihan yang dikembangkan dari fantasi masa remaja. Sebelum menikah mereka memiliki bayangan dan harapan terhadap kehidupan pernikahan yang akan mereka jalani. Khususnya perempuan umumnya cenderung untuk memiliki ide atau persepsi romantis tentang hubungan maupun pasangan mereka (Crawford & Unger, 1992). Harapan yang terlalu optimis tersebut apabila tidak terpenuhi akan menimbulkan kekecewaan dan penyesalan yang pada akhirnya akan mempersulit proses penyesuaian terhadap tugas dan tanggung jawab dalam pernikahan.

2.4. Poligami

2.4.1. Definisi Poligami

Clayton (dalam Sunarto, 2000) mendefinisikan poligami sebagai perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan pada waktu yang sama, atau antara seorang perempuan dengan orang laki-laki pada waktu yang sama. Pengertian yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh Williams, Sawyer, dan Wahlstrom (2006), yang mendefinisikan poligami sebagai bentuk perkawinan dimana seorang individu memiliki beberapa pasangan.

Sedikit berbeda dengan definisi diatas, Low (1988) mengemukakan bahwa para antropolog mendefinisikan poligami sebagai “*a marital relationship involving multiple wives*” (Slonim-Nevo & Al-Krenawi, 2006, hal. 312). Sejalan dengan definisi tersebut, Mulia (2004) juga mendefinisikan poligami sebagai ikatan perkawinan dimana suami mengawini lebih dari satu istri dalam waktu yang sama. Di Indonesia sendiri, istilah poligami lebih dikenal luas sebagai bentuk pernikahan dimana laki-laki menikahi lebih dari satu perempuan. Hirschfelder & Rahmaan (2003) juga mengemukakan bahwa dalam dunia Islam, kata ‘poligami’ banyak digunakan untuk mengacu pada praktik laki-laki Muslim yang menikahi lebih dari satu istri. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, istilah poligami didefinisikan sebagai bentuk perkawinan dimana seorang suami memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang sama.

2.4.2. Landasan Hukum Mengenai Poligami dalam agama Islam

Berkaitan dengan poligami, maka Islam mengatur poligami dalam kitab suci Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 3, yang berbunyi:

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (QS. An-Nisa: 3)

Dari penggalan makna ayat diatas, maka para ahli teologi Islam berpendapat bahwa seorang laki-laki Islam boleh menikahi paling sedikit satu perempuan, paling banyak empat perempuan. Pernikahan poligami juga mensyaratkan laki-laki sebagai suami untuk berlaku adil terhadap seluruh istri-

istrinya. Adapun yang dimaksud dengan ‘adil’, para ahli fikih juga telah bersepakat, bahwa adil antara para istri adalah menyamakan hak yang ada pada para istri dalam perkara-perkara yang memungkinkan untuk disamakan di dalamnya (Tafsir Ibnu Katsir jilid 2 dalam www.perpustakaan-islam.com).

Diantara hak setiap istri dalam poligami yang disarikan dari Husein (1999), Ahmad (2007), dan Hirschfelder & Rahmaan (2003):

1. Memiliki rumah sendiri.
2. Menyamakan para istri dalam masalah jatah waktu gilir.
3. Batasan Malam Pertama Setelah Pernikahan. Jika yang dinikahi adalah gadis, maka suami menginap selama tujuh hari, namun jika menikah dengan janda, ia menginap selama tiga hari.
4. Menyamakan nafkah.
5. Mengundi istri yang akan mendampingi suami ketika suami hendak berpergian.

2.4.3. Landasan Hukum Mengenai Poligami dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Landasan hukum dalam melakukan praktik pernikahan poligami diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berisi antara lain:

❖ **Pasal 3 ayat 2 yang berbunyi:**

“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.”

❖ **Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi:**

“Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

❖ **Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi:**

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri- isteri dan anak-anak mereka;
c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.”

2.4.4. Masalah-Masalah yang Muncul dalam Pernikahan Poligami

Meskipun diperbolehkan oleh agama, namun pada realitasnya praktek poligami memberikan beberapa implikasi negatif. Mulia (2004), Ahmad (2007), dan Slonim-Nevo dan Al-Krenawi (2006) mengemukakan permasalahan tersebut sebagai berikut:

1. Dampak Psikologis Terhadap istri

Wanita dalam keluarga poligami memiliki masalah kesehatan mental yang lebih besar dibandingkan wanita dalam keluarga monogami (Al-Krenawi & Slonim-Nevo, 2006). Adanya anggapan di masyarakat bahwa persoalan suami-istri merupakan persoalan pribadi membuat sang istri kurang dapat bersikap terbuka dan mengungkapkan perasaannya pada orang lain. Sikap istri yang tidak mau terbuka itu juga merupakan bentuk loyalitas terhadap keluarga demi menjaga nama baik keluarga. Akibatnya, istri lebih banyak memendam dan menekan semua kekesalan dan kesedihannya, yang pada akhirnya akan menimbulkan gangguan emosional. Selain itu, istri yang mendapati suaminya menikah laki akan merasa inferior, seolah-olah suaminya berbuat demikian karena ia tidak mampu memenuhi kebutuhan suaminya (Mulia, 2004).

2. Konflik internal dalam keluarga

Pernikahan poligami berpotensi untuk menimbulkan konflik internal keluarga, terutama munculnya pertengkaran antar istri karena iri hati dan permusuhan (Ahmad, 2007; Haviland, 1985). Pertengkaran antar istri ini dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar, yakni pertengkaran diantara anak-anak yang berlainan ibu hingga menjadi pertengkaran antar keluarga. Suami yang berpoligami juga berpotensi mengganggu hubungan suami dengan keluarga besar istri dan sebaliknya.

3. Dampak psikologis pada anak

Penelitian yang dilakukan Al-Krenawi dan Lightman (2000), Cherian (1990), dan Owuamanam (1984) pada negara-negara di Timur Tengah dan Afrika mengindikasikan bahwa anak-anak dari keluarga poligami mengalami masalah fisik, emosional, dan tingkah laku, memiliki konsep diri yang negatif, prestasi akademis yang rendah, serta akan mengalami penyesuaian diri sosial yang

lebih sulit dibanding anak-anak dari keluarga monogami (Slonim-Nevo & Al-Krenawi, 2006, hal. 312).

4. Kekerasan domestik

Berdasarkan data yang diperoleh dari institusi Rifka Annisa (dalam Mulia, 2004), selama tahun 2001 tercatat sebanyak 234 kasus kekerasan terhadap istri. Dari kasus-kasus tersebut, status korban adalah istri yang dipoligami secara rahasia (5,1%), istri yang dipoligami secara resmi (2,5%), korban selingkuh (36,3%), ditinggal suami (2,5%), dicerai (4,2%), istri kedua (0,4%), dan teman kencan (0,4%). Jenis kekerasan yang dilaporkan meliputi kekerasan ekonomi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kekerasan psikis.

5. Dampak sosial

Praktik poligami seringkali dilakukan dengan cara nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatatkan, baik di Kantor Urusan Agama (bagi warga muslim), maupun Kantor Catatan Sipil (bagi warga non-muslim). Akibatnya, Pernikahan tersebut menjadi tidak sah secara hukum, sehingga dengan sendirinya istri tidak dapat menuntut hak-haknya, terutama hak atas nafkah, warisan, dan hak perwalian. Pernikahan bawah tangan juga mempunyai dampak sosial bagi perempuan. Perempuan yang melakukan pernikahan di bawah tangan akan sulit bersosialisasi di masyarakat karena mereka sering dianggap sebagai istri simpanan. Adapun dampak nikah di bawah tangan bagi anak adalah status yang tercantum dalam akta kelahiran anak yang dilahirkan adalah 'anak luar nikah'. Konsekuensinya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, namun tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya (pasal 42 dan 43 Undang-Undang Pernikahan dalam Mulia, 2004).

2.5. *Psychological Well-Being* pada Wanita Dewasa Muda sebagai Istri Kedua dalam Pernikahan Poligami

Pernikahan poligami seringkali diasosiasikan dengan stress, tekanan, konflik, dan disequilibrium dalam struktur keluarga (Al-Krenawi; Al-Krenawi & Graham; Al-Krenawi & Lightman dalam Al-Krenawi, 1999). Prevalensi terbesar dalam gangguan mental juga ditemukan pada wanita-wanita dalam pernikahan

poligami daripada pernikahan monogami (Makanjuola, dalam Al-Krenawi, 1999). Gangguan mental tersebut antara lain gangguan depresif dan kecemasan (Ghubash, Hamdi, & Bebbington, dalam Al-Krenawi, 1999), depresi, gangguan somatis, dan kehilangan *self-esteem* (El-Islam; Camara; dalam Al-Krenawi, 1999).

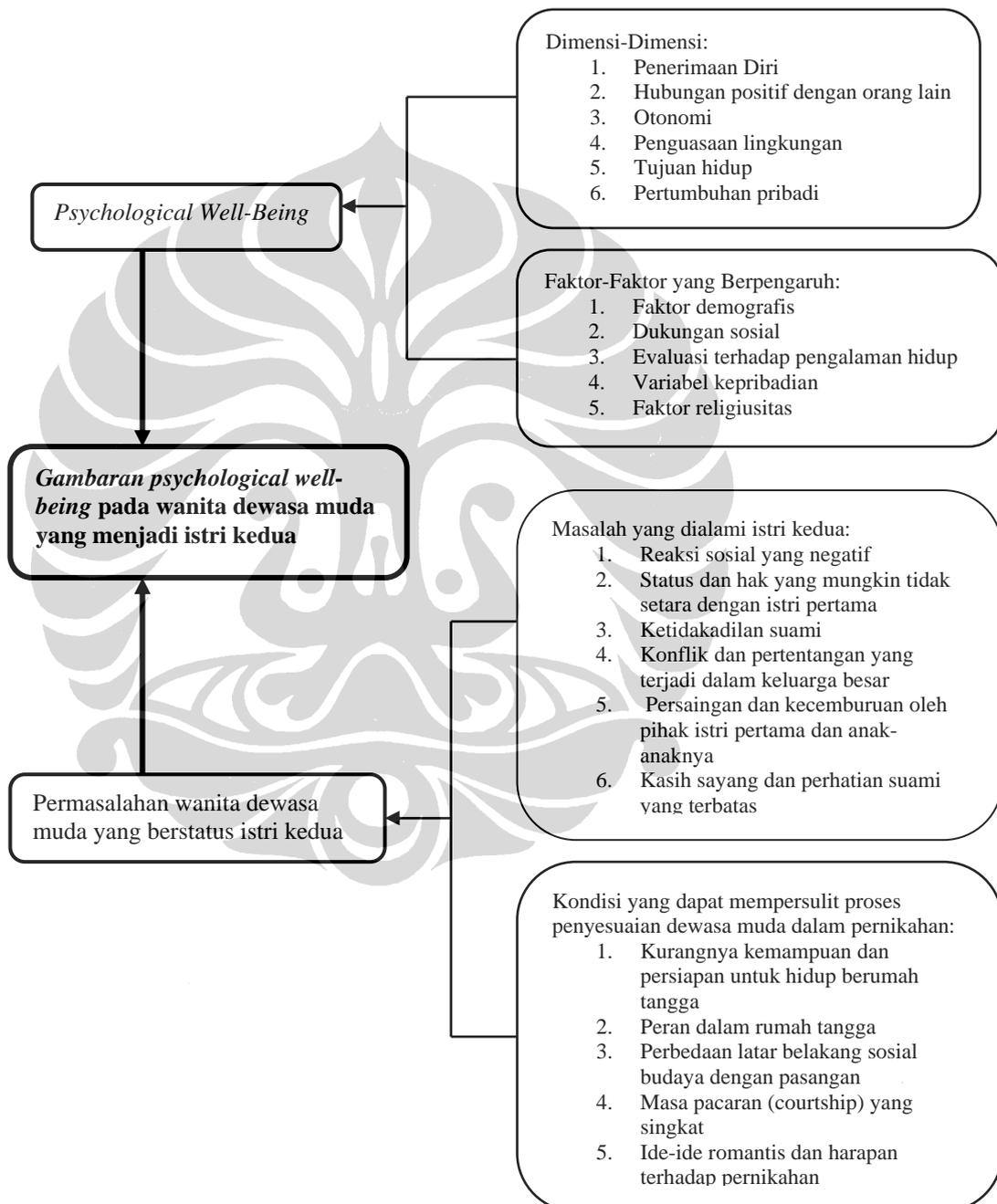
Disisi lain, pernikahan merupakan salah satu isu yang muncul dalam tahap perkembangan dewasa muda. Pernikahan merupakan suatu episode baru dalam kehidupan manusia yang harus dijalani, berikut dengan masalah-masalah dan penyesuaian-penyediaan yang harus dihadapi. Penyesuaian-penyediaan yang harus dilakukan antara lain adalah penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian dalam hal keuangan, hubungan seksual, serta penyesuaian dengan keluarga pasangan (Hurlock, 1980). Kondisi-kondisi yang dapat mempersulit penyesuaian dewasa muda dalam pernikahan antara lain kurangnya kemampuan dalam berumah tangga, peran dalam rumah tangga, pernikahan dini, masa pacaran yang singkat, latar belakang sosial budaya yang berbeda, serta ide-ide romantis mengenai pernikahan (Hurlock, 1980). Penyesuaian dalam pernikahan akan dirasakan semakin sulit dan masalah yang dihadapi dalam pernikahan pun akan menjadi lebih pelik apabila seorang dewasa muda harus menjalankan sistem pernikahan poligami (Ariyani, 2004).

Menjadi istri kedua merupakan pengalaman hidup yang unik. Hal tersebut antara lain disebabkan karena istri kedua merupakan peran yang masih diliputi citra negatif di masyarakat. Selain itu, istri kedua juga mengalami hal-hal yang negatif, seperti persaingan dengan istri pertama (Al-Krenawi; Kilbride & Kilbride; Ware, dalam Al-Krenawi, 1999) dan kekerasan dalam rumah tangga (Mulia, 2004). Pada beberapa kasus poligami dengan pernikahan dibawah tangan (pernikahan yang tidak tercatat di KUA), istri kedua dan anak-anaknya tidak memiliki hak apapun atas properti suami (Mulia, 2004).

Gangguan mental yang dialami wanita-wanita dalam pernikahan poligami seperti yang tercantum dalam beberapa penelitian (Al-Krenawi; Al-Krenawi & Graham; Al-Krenawi & Lightman dalam Al-Krenawi, 1999) serta masalah dan penyesuaian pernikahan wanita dewasa muda yang berstatus sebagai istri kedua akan mempengaruhi *psychological well-being* wanita dewasa muda yang menjadi istri kedua. Ryff (1989) mengemukakan bahwa pengalaman hidup

tertentu dapat mempengaruhi *psychological well-being* seorang individu. Snyder dan Lopez (2007) juga mengemukakan adanya hubungan antara kesehatan mental dengan *psychological well-being*.

Di bawah ini adalah bagan alur berpikir dalam penelitian *psychological well-being* pada wanita dewasa muda yang menjadi istri kedua dalam pernikahan poligami.



Bagan 2.1. *Psychological Well-Being* pada Wanita Dewasa Muda yang Menjadi Istri Kedua dalam Pernikahan Poligami